

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Tinjauan Teori

##### 2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) dalam Ansori dan Fajri (2018) menjelaskan bahwa “hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*”. Brooks dan Dunn (2018) menyatakan bahwa “*agency theory is an attempt to explain organizational behavior and, in particular, corporate governance structures based on the premise that there is an inherent conflict of interest between principals (who own the firm) and agents (who manage the firm). From this principle of a conflict of interest, it develops a comprehensive theory that addresses the importance of contracts, both formal and informal and both written and tacit, that are used in monitoring, controlling, and motivating managerial behavior*” yang dapat diartikan bahwa “teori keagenan adalah upaya untuk menjelaskan perilaku organisasi dan, khususnya, struktur tata kelola perusahaan berdasarkan premis bahwa ada konflik kepentingan yang melekat antara *principals* (yang memiliki perusahaan) dan agen (yang mengelola perusahaan). Dari prinsip konflik kepentingan ini, berkembang teori komprehensif yang membahas pentingnya kontrak, baik formal maupun informal, baik tertulis maupun diam-diam, yang digunakan dalam memantau, mengendalikan, dan memotivasi perilaku manajerial”.

Godfrey *et al.* (2010) menyatakan, “berdasarkan kontrak, *principal* mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Dalam situasi seperti itu, baik *principal* maupun agen menginginkan utilitas yang maksimal dan tidak ada alasan untuk percaya bahwa agen akan selalu bertindak demi kepentingan terbaik *principal*. Masalah keagenan yang

muncul adalah agen yang berperilaku seolah-olah dia memaksimalkan kesejahteraan *principal*. Manajer (agen) mungkin berusaha menghindari stres pribadi akibat terlalu banyak bekerja, dan tidak berusaha secermat mungkin dalam upaya memaksimalkan nilai perusahaan. Karena agen memiliki otoritas pengambilan keputusan, agen dapat mentransfer kekayaan dari *principal* kepada agen jika *principal* tidak melakukan intervensi”.

“*Principal* ataupun agen diasumsikan sebagai orang ekonomi rasional (*rational economic man*) yang hanya dimotivasi oleh kepentingan pribadi, tetapi mereka mungkin berbeda sehubungan dengan preferensi, kepercayaan, dan informasi. Teori keagenan menyatakan bahwa agen akan berperilaku *self-interest* (mementingkan dirinya) yang mungkin akan bertentangan dengan kepentingan *principal*” (Ghozali, 2020). “Akan timbul masalah keagenan jika kepentingan *principal* dan agen tidak searah dan *principal* kurang informasi untuk menilai perilaku agen secara akurat” (Eisenhardt, 1989 dalam Ghozali, 2020). “Masalah keagenan dapat dalam bentuk *moral hazard* atau *adverse selection*. *Moral hazard* (aji mumpung) adalah situasi agen yang kurang *effort* (usaha) dalam hal hubungan pekerjaan dan hal ini dianggap sebagai bentuk perilaku oportunistik meliputi *free-riding*, *shirking*, dan *perk-consumption*” (Chrisman *et al.*, 2004 dalam Ghozali, 2020). “*Adverse selection* adalah situasi agen yang kurang memiliki kemampuan kompeten dalam hubungan pekerjaan” (Eisenhardt, 1989 dalam Ghozali, 2020).

Menurut Godfrey *et al.* (2010), “laba sering dianggap lebih langsung terkait dengan kinerja manajerial dibandingkan dengan harga saham. Laba akuntansi sering digunakan sebagai pengganti nilai saham dalam memberi upah kepada manajer. Misalnya, paket remunerasi manajer dapat mencakup gaji tetap ditambah bonus di mana manajer dibayar persentase keuntungan yang melebihi beberapa laba dasar dikombinasikan dengan beberapa bonus yang terkait dengan nilai saham perusahaan. Dengan cara ini, angka akuntansi juga digunakan dalam menentukan imbalan kontraktual kepada manajer. Oleh

karena itu, sebagai konsekuensinya, manajer memiliki minat yang kuat dalam cara menghitung laba, dan dalam pemilihan kebijakan akuntansi”.

Godfrey *et al.* (2010) menyatakan bahwa “alasan perbedaan insentif pemegang saham dan manajer mengenai kebijakan perusahaan mewakili sejumlah masalah tertentu. Masalah-masalah tersebut terdiri dari”:

1. “*Risk-Adversion* (Penghindaran Risiko)”

“Masalah *risk-adversion* berarti manajer yang lebih menyukai risiko yang lebih kecil daripada pemegang saham. Pemegang saham memiliki kapasitas untuk mendiversifikasi portofolio investasinya sehingga mereka tidak menghindari risiko sehubungan dengan investasinya di perusahaan tertentu. Diversifikasi investasi yang dilakukan pemegang saham cenderung melindungi eksposur terhadap risiko kerugian dari investasi mereka. Berbeda dengan pemegang saham, manajer umumnya lebih suka berinvestasi dalam proyek dengan *net present value (NPV)* yang lebih rendah risikonya karena manajer memiliki modal manusia yang tidak dapat terdiversifikasi secara signifikan yang diinvestasikan dalam bisnis yang mereka kelola. Kehilangan pekerjaan atau dibayar lebih rendah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kekayaan manajer dan risiko ini tidak dapat sepenuhnya didiversifikasi karena manajer umumnya hanya dipekerjakan dalam satu posisi manajemen saja. Oleh karena itu, manajer secara rasional lebih memilih untuk meminimalkan risiko mereka sendiri daripada memaksimalkan nilai perusahaan” (Godfrey *et al.*, 2010).

2. “*Dividend-Retention*”

“Masalah *dividend-retention* terjadi ketika manajer lebih suka membayar lebih sedikit keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen daripada yang diinginkan pemegang saham. Masalah ini dapat timbul karena manajer menahan dana dari bisnis untuk membayar gaji dan tunjangan mereka sendiri dan meningkatkan ukuran perusahaan di bawah manajemennya

untuk meningkatkan ruang lingkup kekuasaan manajer” (Godfrey *et al.*, 2010).

3. “Horizon”

“Masalah horizon berasal dari perbedaan kepentingan waktu pemegang saham dan manajer sehubungan dengan perusahaan. Pemegang saham secara teoritis tertarik pada arus kas perusahaan untuk periode yang tidak terbatas ke masa depan, karena nilai teoritis saham mereka adalah diskonto nilai sekarang dari arus kas masa depan yang dapat diatribusikan ke saham tersebut. Berbeda dengan pemegang saham, manajer tertarik pada arus kas perusahaan hanya selama manajer berniat untuk tinggal di perusahaan tersebut” (Godfrey *et al.*, 2010).

Menurut Godfrey *et al.* (2010), “adanya masalah keagenan akan menimbulkan *agency costs* (biaya keagenan). *Agency costs* adalah ekuivalen nilai uang dari pengurangan kesejahteraan yang dialami oleh *principal* karena perbedaan kepentingan antara *principal* dan agen. *Agency costs* dibagi menjadi”:

1. “*Monitoring costs*, yaitu biaya pemantauan perilaku agen. Biaya ini merupakan pengeluaran untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agen”.
2. “*Bonding costs*, yaitu biaya untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme untuk menjamin agen akan berperilaku untuk kepentingan *principal* atau untuk menjamin agen akan memberikan kompensasi kepada *principal* jika agen bertindak bertentangan dengan kepentingan *principal*. *Bonding costs* merupakan biaya untuk mengikat kepentingan agen dengan *principal*. Biaya yang dikeluarkan oleh manajer (agen) sehubungan dengan aktivitas *bonding* ini meliputi:
  - a. Waktu dan upaya yang diperlukan untuk menghasilkan laporan akuntansi (kuartalan) yang lebih teratur.
  - b. Kendala pada kegiatan manajer karena laporan kuartalan akan mengungkap perilaku oportunistik yang dilakukan manajer.

- c. Pendapatan yang dikorbankan karena agen tidak menjual rahasia perusahaan kepada perusahaan pesaing”.
3. “*Residual loss*, yaitu nilai bersih *output* agen lebih kecil jika dibandingkan dengan kepentingan agen yang sepenuhnya selaras dengan *principal*. Kerugian residual adalah efek dari tindakan yang diambil oleh agen kadang-kadang akan berbeda dari perilaku yang memaksimalkan kepentingan prinsipal meskipun dengan pengeluaran untuk pemantauan dan pengikatan”.

### **2.1.2 Teori *Fraud Triangle* (*Fraud Triangle Theory*)**

Menurut Cressey (1953) dalam Lestari dan Sudarno (2019), “*fraud triangle theory* merupakan suatu teori yang menjelaskan mengenai kondisi yang akan menyebabkan terjadinya kecurangan. Berikut ini penjelasan ketiga kondisi *fraud triangle*”:

1. “*Pressure* (Tekanan/Dorongan)”

“*Pressure* merupakan kondisi ketika manajemen atau pegawai merasakan adanya tekanan untuk berbuat penyelewengan. Faktor yang menjadi pemicu seperti tuntutan ekonomi, pembayaran utang, dan pihak eksternal. Ketika perusahaan tidak dapat memaksimalkan penggunaan aset yang dimiliki maka hal ini menandakan kinerja perusahaan sedang tidak stabil. Ketidakstabilan keuangan perusahaan ditandai dengan pertumbuhan yang masih berada dibawah rata-rata industri. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan pandangan yang buruk terhadap perusahaan oleh pihak ketiga atau investor sehingga aliran dana yang masuk akan berkurang. Namun, ketika aliran dana yang masuk bertambah maka pertanggungjawaban manajemen akan lebih besar untuk memenuhi harapan pihak ketiga. Sehingga hal ini dapat menimbulkan adanya tekanan terhadap manajemen perusahaan sendiri untuk kemungkinan memanipulasi laporan keuangan” (Cressey, 1953 dalam Lestari dan Sudarno, 2019).

2. “*Opportunity* (Kesempatan)”

“*Opportunity* (kesempatan) merupakan tersedianya peluang atau kesempatan yang dimiliki oleh manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan. Kesempatan yang dimaksudkan seperti adanya pemantauan atau pengawasan yang tidak efektif dalam suatu entitas. Ketika pengawasan atau pengendalian didalam perusahaan lemah maka akan memicu manajemen dalam melakukan kecurangan karena memiliki banyak celah atau kesempatan” (Cressey, 1953 dalam Lestari dan Sudarno, 2019).

3. “*Rationalization* (Rasionalisasi)”

“*Rationalization* (rasionalisasi) merupakan timbulnya sikap, karakter, ataupun tindakan yang membolehkan tindakan etis oleh manajemen perusahaan maupun pegawai untuk bertindak tidak jujur. Hal ini dapat terjadi biasanya didalam perusahaan tindakan peraturan atau hukum atas sanksi pelanggaran didalam perusahaan yang lemah. Seperti orang-orang yang berada didalam lingkungan dimana merasionalkan untuk melakukan tindakan kecurangan. Rendahnya integritas yang dimiliki seseorang menimbulkan pola pikir dimana orang tersebut merasa dirinya benar saat melakukan kecurangan, sebagai contoh manajemen membenarkan untuk melakukan praktik manajemen laba. Banyaknya praktik kecurangan yang banyak terjadi menjadi salah satu pemicu manajemen untuk melakukan hal yang sama seperti perusahaan lain, sehingga manajemen menganggap bahwa kecurangan adalah suatu hal yang biasa dilakukan” (Cressey, 1953 dalam Lestari dan Sudarno, 2019).

## 2.2 Kecurangan Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 (2022), “laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan

keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi:

- a. aset;
- b. kewajiban;
- c. ekuitas;
- d. penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian;
- e. kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; dan
- f. arus kas”.

“Informasi tersebut, beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi kas masa depan entitas dan, khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas masa depan” (IAI, 2022 dalam PSAK 1).

Berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 (2022), ”komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari”:

1. “Laporan Posisi Keuangan pada Akhir Periode”

Menurut Weygandt *et al.* (2019), “laporan posisi keuangan (terkadang disebut sebagai neraca) adalah laporan yang melaporkan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada tanggal tertentu”. Berdasarkan IAI dalam PSAK 1 (2022), “laporan posisi keuangan mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut: aset tetap; properti investasi, aset takberwujud; aset keuangan; investasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas; aset biologis; persediaan; piutang usaha dan piutang lain; kas dan setara kas; total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan aset yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki

untuk dijual; utang usaha dan utang lain; provisi; liabilitas keuangan; liabilitas dan aset untuk pajak kini; liabilitas dan aset pajak tangguhan; liabilitas yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual; kepentingan nonpengendali, disajikan sebagai bagian dari ekuitas; dan modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk”.

2. “Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Selama Periode”

“Laporan laba rugi menyajikan pendapatan dan beban dan menghasilkan laba bersih atau rugi bersih untuk periode waktu tertentu. Laporan laba rugi komprehensif menyajikan pos-pos penghasilan komprehensif lain yang tidak termasuk dalam penentuan laba bersih” (Weygandt *et al.*, 2019). Menurut Kieso *et al.* (2018), “dalam laporan laba rugi, perusahaan umumnya menyajikan beberapa atau semua bagian dan total komponen berikut:

- a. *Sales* atau *revenue*, yaitu komponen yang menyajikan penjualan, diskon, potongan harga, retur, dan informasi terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan jumlah bersih dari pendapatan penjualan.
- b. *Cost of goods sold (COGS)*, yaitu komponen yang menunjukkan harga pokok penjualan untuk menghasilkan penjualan.
- c. *Gross profit*, yaitu pendapatan dikurang harga pokok penjualan.
- d. *Selling expenses*, yaitu komponen yang melaporkan biaya yang dihasilkan dari upaya perusahaan untuk melakukan penjualan.
- e. *Administrative* atau *general expenses*, yaitu komponen yang melaporkan biaya administratif umum.
- f. *Other income and expense*, yaitu komponen yang mencakup transaksi lain yang tidak sesuai dengan kategori pendapatan, *cost of goods sold*, *selling expense*, dan *administrative* atau *general expense* yang disebutkan di atas. Hal-hal seperti keuntungan dan kerugian atas penjualan aset berumur panjang, penurunan nilai aset, dan biaya restrukturisasi dilaporkan dalam bagian ini. Selain itu, pendapatan seperti pendapatan sewa, pendapatan dividen, dan pendapatan bunga juga sering dilaporkan.

- g. *Income from operations*, yaitu pendapatan perusahaan dari kegiatan operasi normal.
- h. *Financing costs*, yaitu pos terpisah yang mengidentifikasi *financing cost* (biaya pembiayaan) perusahaan, disebut juga sebagai biaya bunga.
- i. *Income before income tax*, yaitu total pendapatan sebelum pajak penghasilan.
- j. *Income tax*, yaitu bagian singkat yang melaporkan pajak yang dikenakan atas pendapatan sebelum pajak penghasilan.
- k. *Income from continuing operations*, yaitu hasil perusahaan sebelum keuntungan atau kerugian dari operasi yang dihentikan. Jika perusahaan tidak memiliki keuntungan atau kerugian atas operasi yang dihentikan, bagian ini tidak dilaporkan dan jumlah ini dilaporkan sebagai laba bersih.
- l. *Discontinued operations*, yaitu keuntungan atau kerugian yang diakibatkan oleh disposisi suatu komponen perusahaan.
- m. *Net income*, yaitu hasil bersih dari kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu.
- n. *Non-controlling interest*, yaitu menyajikan alokasi laba bersih kepada pemegang saham pengendali dan kepentingan nonpengendali.
- o. *Earning per share*, yaitu laba per lembar saham yang dilaporkan”.

Menurut *Kieso et al.* (2018), “penghasilan komprehensif mencakup semua perubahan ekuitas selama suatu periode kecuali yang dihasilkan dari investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik. Oleh karena itu, pendapatan komprehensif mencakup hal-hal berikut: semua pendapatan dan keuntungan, beban dan kerugian yang dilaporkan dalam laba bersih, dan semua keuntungan dan kerugian yang melewati pendapatan bersih tetapi mempengaruhi ekuitas. Item-item tersebut (perubahan ekuitas non-pemilik yang melewati laporan laba rugi) disebut sebagai penghasilan komprehensif lain”.

### 3. “Laporan Perubahan Ekuitas Selama Periode”

Menurut IAI dalam PSAK 1 (2022), “laporan perubahan ekuitas mencakup informasi sebagai berikut:

- a. Total penghasilan komprehensif selama periode berjalan, yang menunjukkan secara tersendiri jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali.
- b. Untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif.
- c. Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara tersendiri (paling sedikit) mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari: laba rugi; penghasilan komprehensif lain; dan transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara tersendiri kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dan perubahan hak kepemilikan atas kepentingan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilangnya pengendalian”.

Menurut Kieso *et al.* (2018), “ekuitas umumnya terdiri dari *share capital-ordinary* (modal saham biasa), *share premium-ordinary* (agio saham biasa), *retained earnings* (laba ditahan), dan akumulasi saldo penghasilan komprehensif lain. Laporan perubahan ekuitas melaporkan perubahan pada setiap akun ekuitas dan total ekuitas untuk periode tersebut. Berikut hal-hal yang diungkapkan dalam laporan perubahan ekuitas:

- a. Akumulasi penghasilan komprehensif lain untuk periode yang bersangkutan.
  - b. Kontribusi (penerbitan saham) dan distribusi (dividen) kepada pemilik.
  - c. Rekonsiliasi nilai tercatat setiap komponen ekuitas dari awal hingga akhir periode”.
4. “Laporan Arus Kas Selama Periode”  
Berdasarkan IAI dalam PSAK 1 (2022), “informasi arus kas menyediakan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam

menggunakan arus kas tersebut”. “Laporan arus kas merangkum informasi tentang arus kas masuk (penerimaan) dan arus keluar (pembayaran) untuk jangka waktu tertentu. Laporan arus kas melaporkan pengaruh kas dari operasi perusahaan, aktivitas investasinya, aktivitas pendanaannya, kenaikan atau penurunan bersih kas selama periode tersebut, dan jumlah kas pada akhir periode.” (Weygandt *et al.*, 2019). Menurut Kieso *et al.* (2020), “perusahaan mengklasifikasikan penerimaan kas dan pembayaran kas selama suatu periode menjadi 3 aktivitas berbeda dalam laporan arus kas, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan yang didefinisikan sebagai berikut:

- a. Aktivitas operasi melibatkan pengaruh kas dari transaksi yang masuk ke dalam penentuan laba bersih.
  - b. Aktivitas investasi adalah aktivitas yang mencakup pembuatan dan penagihan pinjaman serta perolehan dan penjualan investasi (baik utang maupun ekuitas), properti, pabrik, dan peralatan.
  - c. Aktivitas pembiayaan melibatkan item liabilitas dan ekuitas, termasuk mendapatkan sumber daya dari pemilik dan memberi pengembalian investasi tersebut, meminjam uang dari kreditur, serta membayar kembali jumlah yang dipinjam”.
5. “Catatan Atas Laporan Keuangan”

Menurut IAI dalam PSAK 1 (2022), “catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan deskripsi naratif atau pemisahan pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan tersebut”. “Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan keijakam akuntansi spesifik yang digunakan, mengungkapkan informasi yang disyaratkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, dan menyediakan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi

tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan” (IAI, 2022 dalam PSAK 1).

6. “Informasi Komparatif Mengenai Periode Terdekat Sebelumnya”

“Entitas menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode terdekat sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali diizinkan atau disyaratkan laon oleh SAK. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. Entitas menyajikan, minimal, dua laporan posisi keuangan, dua laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dua laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), dua laporan arus kas, dan dua laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan terkait” (IAI, 2022 dalam PSAK 1).

7. “Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya”.

Menurut *Weygandt et al. (2019)*, “informasi keuangan yang dibutuhkan pengguna bergantung pada jenis keputusan yang mereka buat. Ada dua kelompok besar pengguna informasi keuangan”:

1. “*Internal Users*”

“*Internal users* (pengguna internal) informasi akuntansi adalah manajer yang merencanakan, mengatur, dan menjalankan bisnis. Pengguna internal ini termasuk manajer pemasaran, pengawas produksi, direktur keuangan, dan karyawan perusahaan” (*Weygandt et al., 2019*).

2. “*External Users*”

“*External users* (pengguna eksternal) adalah individu dan organisasi di luar perusahaan yang menginginkan informasi kuangan tentang perusahaan. Dua jenis pengguna eksternal yang paling umum adalah investor dan kreditur. Investor (pemilik) menggunakan informasi akuntansi untuk memutuskan apakah akan membeli, menahan, atau menjual saham kepemilikan suatu

perusahaan. Kreditur (seperti pemasok dan bankir) menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi risiko pemberian kredit atau meminjamkan uang” (Weygandt *et al.*, 2019).

“Laporan keuangan memberikan informasi mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang nantinya dapat digunakan oleh pihak manajemen, kreditor, investor hingga pemegang saham untuk menilai kinerja perusahaan dan menentukan langkah apa yang harus diambil setelahnya” (Janrosl dan Yuliadi, 2019). “Laporan keuangan dapat berguna dalam proses pengambilan keputusan ekonomi baik bagi pihak internal maupun eksternal yang berada di lingkup perusahaan. Hal ini menyebabkan keinginan perusahaan untuk menyajikan informasi sebagus mungkin untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan penggunanya yang pada akhirnya dapat menimbulkan risiko kecurangan (*fraud*) yang besar” (Faradiza, 2019).

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Standar Audit 240 (2021), “kecurangan adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, atau pihak ketiga, yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh suatu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum”.

Menurut Mary-Jo Kranacher *et al.* (2011) dalam Aprilia (2017), “terdapat tiga unsur dalam kecurangan sebagai berikut”:

1. “*Conversion*, yang berarti menipu, merekayasa, membohongi, dan lainnya. Dalam hal ini, kecurangan dimulai dengan adanya niat jahat untuk melakukan manipulasi dan rekayasa atas suatu kondisi demi kepentingan pribadi dan kelompok yang dapat merugikan pihak lain”.
2. “*Concealment*, yang berarti menyembunyikan atau terjadinya pembelokan. Karena kecurangan merupakan salah satu bentuk kejahatan maka tentunya para pelaku tidak ingin diketahui oleh pihak lainnya. Para pelaku melakukan nepotisme dan berkolusi untuk menyembunyikan kejahatannya agar perbuatan tersebut tidak diketahui oleh pihak luar. Karena apabila perbuatan

tersebut sampai diketahui pihak luar maka akan menimbulkan sanksi yang berat bagi mereka”.

3. “*Theft*, yang berarti mengambil kekayaan secara tidak sah. Manipulasi, penipuan dan rekayasa yang telah dilakukan secara sembunyi sembunyi tentunya dilakukan dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan finansial secara tidak sah”.

*Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* dalam Yando dan Purba (2020) menyatakan, “*fraud* (kecurangan) diklasifikasi menjadi tiga jenis sebagai berikut”:

1. “Korupsi (*Corruption*)”

“Korupsi adalah penggunaan pengaruh secara salah untuk mendapatkan manfaat bagi pelaku atau orang lain, yang bertentangan dengan tugas atau hak orang lain. Korupsi terdiri dari” (Yando dan Purba, 2020):

- a. “Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*)”

“Konflik kepentingan antara dua pelaku yang disebut *principal* dan agen. *Principal* adalah orang yang memberikan suatu pertanggungjawaban atau mandat kepada agen. Hubungan *principal* dan agen bisa terjadi antara manajer dengan bawahan, dewan komisaris dengan jajaran direksi, dan lainnya. Intinya, konflik kepentingan akan muncul ketika agen memiliki kepentingan atau tujuan yang berbeda atau bertentangan dengan *principal*. Secara umum, konflik kepentingan dapat menyebabkan karyawan bertindak di luar kepentingan dan tujuan suatu perusahaan. Munculnya konflik kepentingan adalah berita buruk bagi reputasi, integritas, dan kepercayaan publik terhadap suatu perusahaan” (Yando dan Purba, 2020).

- b. “Penyuapan (*Bribery*)”

“Penyuapan atau *bribery* adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang dengan memberikan, membayar maupun menawarkan sesuatu berupa materi yang memiliki nilai moneter, yang nantinya akan mempengaruhi tindakan maupun keputusan seseorang

dan sekelompok orang tersebut demi mempelancar suatu urusan atau demi kepentingan mereka, atau dengan kata lain memberikan sesuatu demi mempelancar suatu urusan yang diinginkan” (Yando dan Purba, 2020).

c. “Penerimaan yang Tidak Sah/Ilegal (*Illegal Gratuities*)”

“Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, kredit tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik” (Yando dan Purba, 2020).

d. “Pemerasan Ekonomi (*Economic Extortion*)”

“Pemerasan ekonomi merupakan penggunaan (atau ancaman) kekuatan (termasuk sanksi ekonomi) oleh individu atau organisasi untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang bernilai itu dapat berupa uang, barang atau ekonomi, informasi, atau kerja sama untuk mendapatkan suatu keputusan yang menguntungkan atas pekerjaan atau hal tertentu yang sedang ditangani” (Yando dan Purba, 2020).

2. “Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)”

“Penyalahgunaan aset merupakan pengambilan aset secara ilegal atau sering disebut penggelapan. Penyalahgunaan aset dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung demi keuntungan si pelaku. Penyalahgunaan aset biasanya berupa” (Yando dan Purba, 2020):

a. “Kas (*Cash*)”

1) “*Larceny*, yaitu pencurian uang/kas setelah dicatat dalam pembukuan entitas”.

2) “*Skimming*, yaitu pencurian uang/kas sebelum dicatat dalam pembukuan entitas”.

- 3) “*Fraudulent disbursement*, yaitu para pelaku melakukan trik agar perusahaan mengeluarkan uang secara tidak benar. Ada beberapa jenis penipuan pencairan dana antara lain”:
- a) “*Billing schemes*, yaitu entitas mengeluarkan uang berdasarkan faktur fiktif untuk barang/jasa yang dibelinya, atau *mark-up* nilai fakturnya, atau faktur pembelian untuk keperluan pribadi”.
  - b) “*Payroll schemes*, yaitu entitas melakukan klaim kompensasi berdasarkan data yang tidak seharusnya. Hal ini dapat berupa *ghost employee* atau karyawan fiktif”.
  - c) “*Check tampering*, yaitu menukar dana perusahaan dengan mengubah dana pada suatu bank, atau mencuri cek yang ditujukan kepada pihak lain”.
  - d) “*Register disbursement schemes*, yaitu memasukkan *input* yang salah pada mesin kasir untuk menutupi uang yang diambil pelaku”.
- b. “Bukan Kas (*Non Cash*)”
- 1) “*Misuse*, yaitu penyalahgunaan aset untuk kepentingan pribadi”.
  - 2) “*Larceny*, yaitu pencurian aset setelah dicatat dalam pembukuan entitas”.
3. “Kecurangan Pelaporan (*Fraudulent Statement*)”
- “*Fraud* sehubungan dengan salah tentang salah saji atau pengabaian jumlah atau pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pemakai laporan itu. Meskipun kebanyakan kasus pelaporan keuangan yang curang melibatkan upaya melebihi sajian laba, baik dengan melebihi sajian aset dan laba atau dengan kewajiban dan beban, entitas juga sengaja merendahkan sajian laba. Dalam entitas tertutup, hal ini mungkin dilakukan dalam upaya mengurangi pajak penghasilan. Entitas juga mungkin sengaja merendahkan sajian laba ketika laba itu tinggi untuk membentuk cadangan laba atau *cookie jar reserve*, yang dapat digunakan untuk memperbesar laba dalam periode mendatang. Pengaturan laba (*earning management*) menyangkut tindakan manajemen yang disengaja untuk memenuhi tujuan laba. Perataan

laba (*income smoothing*) merupakan salah satu bentuk pengaturan laba dengan pendapatan dan beban yang ditukar-tukar di antara periode-periode untuk mengurangi fluktuasi laba. Salah satu teknik untuk meratakan laba adalah dengan mengurangi nilai persediaan dan aset lain entitas yang diperoleh pada saat akuisisi, yang menghasilkan laba yang lebih tinggi ketika aset tersebut nanti dijual” (Yando dan Purba, 2020).

Arens *et al.* (2020) menyatakan bahwa “*fraudulent financial reporting* adalah salah saji yang disengaja atau penghilangan jumlah atau pengungkapan dengan maksud untuk menipu pengguna”. Lestari dan Sudarno (2019) menyatakan bahwa “kecurangan laporan keuangan adalah kesalahan material atau penghilangan material secara sengaja dengan tujuan untuk menyesatkan pengguna informasi laporan keuangan. Kecurangan dalam laporan keuangan biasanya dapat terjadi dalam bentuk mempublikasikan secara sengaja ketika perusahaan telah menyajikan aset atau pendapatan lebih tinggi dari yang sebenarnya (*overstates*), dan ketika perusahaan telah menyajikan kewajiban atau beban lebih rendah dari yang sebenarnya (*understates*)”.

Berdasarkan IAPI dalam SA 240 (2021), “pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Manipulasi, pemalsuan (termasuk peniruan), atau perubahan catatan akuntansi atau dokumentasi pendukung yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan.
- b. Pernyataan salah, atau penghilangan secara sengaja atas peristiwa, transaksi, atau informasi signifikan lainnya dalam laporan keuangan.
- c. Penerapan salah yang disengaja atas prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, penyajian, atau pengungkapan”.

Menurut IAPI dalam SA 240 (2021), “pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan sering kali melibatkan pengabaian pengendalian oleh manajemen walaupun pengendalian tersebut tampak beroperasi dengan efektif. Kecurangan

dapat dilakukan melalui pengabaian pengendalian oleh manajemen dengan beberapa teknik sebagai berikut:

- a. Pencatatan atas jurnal fiktif, terutama menjelang akhir periode akuntansi, untuk memanipulasi hasil operasi atau untuk mencapai tujuan lainnya.
- b. Penyesuaian asumsi secara tidak tepat dan mengubah pertimbangan yang telah digunakan untuk mengestimasi saldo akun.
- c. Penghilangan, pengakuan secara awal, atau penundaan pengakuan dalam laporan keuangan atas peristiwa dan transaksi yang telah terjadi selama periode pelaporan.
- d. Penyembunyian atas fakta yang dapat memengaruhi angka-angka yang dicatat dalam laporan keuangan.
- e. Penggunaan transaksi yang kompleks yang disusun untuk menyajikan posisi atau kinerja keuangan entitas secara tidak tepat.
- f. Pengubahan atas catatan dan ketentuan yang terkait dengan transaksi signifikan dan tidak biasa”.

Kecurangan laporan keuangan dalam penelitian ini diukur dengan *Beneish M-Score Model*. Beneish (2012) dalam Irwandi *et al.* (2019) telah mengembangkan model untuk mengklasifikasikan perusahaan menjadi dua, yaitu yang melakukan kecurangan dan tidak melakukan kecurangan. “*M-Score* adalah model matematika yang menggunakan delapan rasio keuangan untuk mengidentifikasi apakah perusahaan telah memanipulasi laporan keuangannya. Perusahaan dikatakan melakukan kecurangan laporan keuangan jika *M-Score*  $>$  -2,22 (nilai positif atau kurang negatif dari ini), jika *M-Score*  $<$  -2,22 (nilai negatif lebih tinggi dari ini) perusahaan tidak melakukan kecurangan laporan keuangan)” (Irwandi *et al.*, 2019). “Model *Beneish M-Score* menggunakan delapan ratio untuk mendeteksi terjadinya kecurangan dengan menggunakan data keuangan dua tahun berturut-turut (tahun sebelumnya dan tahun berjalan). Nilai *M-Score* yang digunakan yaitu lebih besar dari -2,22 dengan indikasi perusahaan tergolong manipulasi yang akan diberi kode = 1 dan lebih kecil dari -2,22 maka perusahaan tidak tergolong manipulasi yang akan diberi kode = 0” (Lestari dan Sudarno, 2019).

Menurut Beneish (2012) dalam Irwandi *et al.* (2019), Model *Beneish M-Score* didasarkan pada delapan variabel faktor dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 M - Score = & -4,840 + (0,920 \times DSRI) + (0,528 \times GMI) \\
 & + (0,404 \times AQI) + (0,892 \times SGI) \\
 & + (0,115 \times DEPI) - (0,172 \times SGAI) \\
 & - (0,327 \times LVGI) + (4,697 \times TATA)
 \end{aligned}
 \tag{2.1}$$

Tabel 2.1 Operasi *Beneish Model*

Variabel	Rumus
<i>Days Sales Receivable Index (DSRI)</i>	$\frac{(Net\ Receivables_t / Sales_t)}{(Net\ Receivables_{t-1} / Sales_{t-1})}$
<i>Gross Margin Index (GMI)</i>	$\frac{[(Sales_{t-1} - Cost\ of\ Goods\ Sold_{t-1}) / Sales_{t-1}]}{[(Sales_t - Cost\ of\ Goods\ Sold_t) / Sales_t]}$
<i>Aset Quality Index (AQI)</i>	$\frac{[1 - ((Current\ Assets_t + PPE_t) / Total\ Assets_t)]}{[1 - ((Current\ Assets_{t-1} + PPE_{t-1}) / Total\ Assets_{t-1})]}$
<i>Sales Growth Index (SGI)</i>	$\frac{Sales_t}{Sales_{t-1}}$
<i>Depreciation Index (DEPI)</i>	$\frac{[Depreciation_{t-1} / (PPE_{t-1} + Depreciation_{t-1})]}{[Depreciation_t / (PPE_t + Depreciation_t)]}$
<i>SG&amp;A Expense Index (SGAI)</i>	$\frac{(Selling\ General\ \&\ Administrative\ Expense_t / Sales_t)}{(Selling\ General\ \&\ Administrative\ Expense_{t-1} / Sales_{t-1})}$
<i>Leverage Index (LVGI)</i>	$\frac{[(Current\ Liabilities_t + Total\ Long\ Term\ Debt_t) / Total\ Asset_t]}{[(Current\ Liabilities_{t-1} + Total\ Long\ Term\ Debt_{t-1}) / Total\ Asset_{t-1}]}$
<i>Total Accruals to Total Assets (TATA)</i>	$\frac{Income\ from\ Continuing\ Operations_t - Cash\ Flows\ from\ Operations_t}{Total\ Assets_t}$

Sumber: Beneish (2012) dalam Irwandi *et al.* (2019)

Keterangan:

$Net\ Receivables_t$	: Jumlah piutang usaha bersih pada tahun t
$Net\ Receivables_{t-1}$	: Jumlah piutang usaha bersih pada 1 tahun sebelum tahun t
$Sales_t$	: Jumlah penjualan pada tahun t
$Sales_{t-1}$	: Jumlah penjualan pada 1 tahun sebelum tahun t
$Cost\ of\ Goods\ Sold_t$	: Harga pokok penjualan pada tahun t
$Cost\ of\ Goods\ Sold_{t-1}$	: Harga pokok penjualan pada 1 tahun sebelum tahun t
$Current\ Asset_t$	: Jumlah aset lancar perusahaan pada tahun t
$Current\ Asset_{t-1}$	: Jumlah aset lancar perusahaan pada 1 tahun sebelum tahun t
$PPE_t$	: Jumlah aset <i>property, plant, dan equipment</i> bersih perusahaan pada tahun t
$PPE_{t-1}$	: Jumlah aset <i>property, plant, dan equipment</i> bersih perusahaan pada 1 tahun sebelum tahun t
$Total\ Assets_t$	: Jumlah aset perusahaan pada tahun t
$Total\ Assets_{t-1}$	: Jumlah aset perusahaan pada 1 tahun sebelum tahun t
$Depreciation_t$	: Depresiasi pada tahun t
$Depreciation_{t-1}$	: Depresiasi pada 1 tahun sebelum tahun t
$Selling\ General\ \&\ Administrative\ Expense_t$	: Beban <i>selling general &amp; administrative</i> pada tahun t
$Selling\ General\ \&\ Administrative\ Expense_{t-1}$	: Beban <i>selling general &amp; administrative</i> pada tahun t-1

	<i>administrative</i> pada 1 tahun sebelum tahun t
<i>Current Liabilities<sub>t</sub></i>	: Jumlah liabilitas lancar perusahaan pada tahun t
<i>Current Liabilities<sub>t-1</sub></i>	: Jumlah liabilitas lancar perusahaan pada 1 tahun sebelum tahun t
<i>Total Long Term Debt<sub>t</sub></i>	: Jumlah liabilitas jangka panjang perusahaan pada tahun t
<i>Total Long Term Debt<sub>t-1</sub></i>	: Jumlah liabilitas jangka panjang perusahaan pada 1 tahun sebelum tahun t
<i>Income from Continuing Operations<sub>t</sub></i>	: Laba tahun berjalan perusahaan pada 1 tahun t
<i>Cash Flows from Operations<sub>t</sub></i>	: Arus kas dari aktivitas operasi perusahaan pada tahun t

Menurut Yando dan Purba (2020), “*Beneish M-Score* memiliki 8 variabel, yaitu sebagai berikut”:

1. “*Days Sales in Receivables Index (DSRI)*”

“*DSRI* adalah rasio penjualan dalam piutang pada tahun pertama di mana manipulasi laba ditemukan dibandingkan dengan 1 tahun sebelumnya (t-1). Variabel ini mengukur apakah piutang dan pendapatan berada dalam keseimbangan atau keluar dari keseimbangan dalam dua tahun berturut-turut. Sebuah peningkatan besar pada penjualan dalam piutang bisa menjadi hasil dari perubahan dalam kebijakan kredit untuk memacu penjualan dalam menghadapi persaingan yang meningkat, tetapi peningkatan yang tidak proporsional dalam piutang mungkin juga mengindikasikan adanya inflasi pendapatan. Peningkatan besar penjualan dalam piutang berkaitan dengan kemungkinan lebih tinggi bahwa adanya pendapatan dan laba yang dilebihkan” (Yando dan Purba, 2020).

2. “*Gross Margin Index (GMI)*”

“*GMI* adalah rasio margin laba kotor pada tahun  $t-1$  terhadap margin laba kotor pada tahun  $t$ . Ketika *GMI* lebih besar dari 1, menunjukkan bahwa margin laba kotor semakin memburuk” (Yando dan Purba, 2020). Lev dan Thiagarajan (1993) dalam Yando dan Purba (2020) menunjukkan bahwa “penurunan margin laba kotor adalah sinyal negatif terhadap prospek perusahaan. Perusahaan dengan prospek negatif dapat meningkatkan kemungkinan perusahaan untuk terlibat dalam manipulasi laba. Terdapat hubungan positif antara *GMI* dan kemungkinan manipulasi laba”.

3. “*Asset Quality Index (AQI)*”

“Kualitas aset pada tahun tertentu adalah rasio aset tidak lancar selain aset tetap atau *property, plant and equipment (PPE)* terhadap total aset dan mengukur proporsi total aset yang memiliki manfaat di masa mendatang dengan potensi tidak menentu. *AQI* adalah rasio kualitas aset pada tahun  $t$ , terhadap kualitas aset tahun  $t-1$ . Rasio *AQI* lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa perusahaan berpotensi meningkatkan keterlibatannya dalam penangguhan biaya” (Yando dan Purba, 2020).

4. “*Sales Growth Index (SGI)*”

“*SGI* adalah rasio penjualan pada tahun  $t$  terhadap penjualan di tahun  $t-1$ . Pertumbuhan bukan berarti manipulasi, namun pertumbuhan perusahaan dipandang oleh para profesional sebagai lebih mungkin untuk melakukan kecurangan laporan keuangan karena posisi keuangan dan kebutuhan modal memberikan tekanan kepada manajer untuk mencapai target laba. Selain itu, kekhawatiran tentang kontrol dan pelaporan cenderung lebih lambat dari operasi dalam periode pertumbuhan tinggi” (Yando dan Purba, 2020).

5. “*Depreciation Index (DEPI)*”

“*DEPI* adalah rasio tingkat depresiasi pada tahun  $t-1$  dibandingkan dengan tingkat penyusutan tahun  $t$ . Tingkat penyusutan tahun tertentu dihitung

dengan depresiasi/(depresiasi+PPE). *DEPI* lebih besar dari 1 yang menunjukkan bahwa tingkat aset disusutkan telah melambat, meningkatkan kemungkinan bahwa perusahaan telah merevisi perkiraan masa manfaat aset atau mengadopsi metode baru yang dapat meningkatkan pendapatan” (Yando dan Purba, 2020).

6. “*Sales General and Administrative Expense Index (SGAI)*”

“*SGAI* dihitung sebagai rasio *SGA (Sales, General, and Administrative Expense)* terhadap penjualan pada tahun *t* dibandingkan dengan rasio *SGA* terhadap penjualan pada tahun *t-1*” (Yando dan Purba, 2020).

7. “*Leverage Index (LVGI)*”

“*LVGI* adalah rasio total utang terhadap total aset pada tahun *t* terhadap rasio total utang terhadap total aset di tahun *t-1*. *LVGI* yang lebih besar dari 1 menunjukkan peningkatan *leverage*” (Yando dan Purba, 2020).

8. “*Total Accruals tot Total Assets (TATA)*”

“Jumlah akrual dihitung sebagai pendapatan dari operasi dikurang dengan arus kas dari operasi. Total akrual dapat digunakan untuk menilai sejauh mana manajer membuat pilihan akuntansi diskresioner untuk mengubah laba” (Yando dan Purba, 2020).

### **2.3 Financial Stability**

“*Financial stability* merupakan gambaran mengenai stabil atau tidak suatu kondisi keuangan perusahaan” (Ijudien, 2018). “Salah satu upaya memanipulasi laporan keuangan adalah terkait dengan pertumbuhan aset. Oleh karena itu, rasio perubahan total aset dijadikan proksi pada variabel stabilitas keuangan (*financial stability*)” (Skousen *et al.*, 2008 dalam Ijudien, 2018). “Aset dapat digunakan untuk melihat kondisi stabilitas keuangan perusahaan karena aset menggambarkan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Kondisi perusahaan yang tidak stabil

terjadi karena manajemen tidak mampu mengelola aset yang dimiliki, sehingga menyebabkan perubahan total aset yang terlalu tinggi atau terlalu rendah selama periode tertentu” (Septriani dan Handayani, 2018).

Menurut Suhendah (2019), rasio perubahan total aset (*ACHANGE*) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$ACHANGE = \frac{Total\ Assets_t - Total\ Assets_{t-1}}{Total\ Assets_{t-1}} \quad (2.2)$$

Keterangan:

*ACHANGE* : Perubahan jumlah aset perusahaan selama dua tahun

*Total Assets<sub>t</sub>* : Jumlah aset yang dimiliki perusahaan pada tahun t

*Total Assets<sub>t-1</sub>* : Jumlah aset yang dimiliki perusahaan pada 1 tahun sebelum tahun t

Menurut Kieso *et al.* (2018), “aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan mengalir ke entitas”.

Menurut Kieso *et al.* (2018), “aset terdiri dari 2 kelompok, yaitu *current assets* (aset lancar) dan *non-current assets* (aset tidak lancar). *Current assets* (aset lancar) adalah aset yang diharapkan perusahaan untuk dikonversi menjadi uang tunai atau digunakan dalam satu tahun atau siklus operasinya. *Non-current assets* (aset tidak lancar) adalah aset yang tidak memenuhi definisi aset lancar”.

Menurut Kieso *et al.* (2018), “*Non-current assets* mencakup beberapa aset meliputi”:

1. “*Long-Term Investments*”

“*Long-term investments* (investasi jangka panjang) sering hanya disebut sebagai investasi, terdiri dari 4 jenis”:

- a. *“Investments in securities* (investasi pada sekuritas), seperti obligasi, saham biasa, atau wesel jangka panjang”.
  - b. *“Investments in tangible assets not currently used in operations* (investasi pada aset tetap berwujud yang saat ini tidak digunakan dalam kegiatan operasional), seperti tanah untuk spekulasi”.
  - c. *“Investments set aside in special funds* (investasi yang disisihkan pada dana khusus), seperti dana *sinking fund* (pembayaran utang), dana pensiun, atau dana ekspansi pabrik”.
  - d. *“Investment in non-consolidated subsidiaries or associated companies* (investasi pada anak perusahaan yang tidak dikonsolidasi atau perusahaan asosiasi)”.
2. *“Property, Plant, and Equipment”*  
*“Property, plant, and equipment* adalah aset berwujud berumur panjang yang digunakan dalam operasi reguler bisnis. Aset ini terdiri dari properti fisik seperti tanah, bangunan, mesin, furnitur, peralatan, dan *wasting resources* (mineral). Selain tanah, perusahaan dapat melakukan penyusutan atau mendepleksi aset ini”.
  3. *“Intangible Assets”*  
*“Intangible assets* (aset tidak berwujud) adalah aset yang tidak memiliki substansi fisik dan bukan merupakan instrumen keuangan. Aset yang termasuk dalam *intangible assets* adalah paten, hak cipta, waralaba, *goodwill*, merek dagang, *trade names*, dan *customer lists* (daftar pelanggan). Perusahaan menghapuskan (mengamortisasi) *intangible assets* dengan umur terbatas selama masa manfaatnya. Secara berkala perusahaan akan menilai *intangible assets* (seperti *goodwill*) untuk penurunan nilai. Biaya penelitian dan pengembangan dibebankan pada saat terjadinya, kecuali untuk biaya pengembangan tertentu yang dikapitalisasi ketika kemungkinan besar proyek pengembangan akan menghasilkan manfaat ekonomi pada masa depan”.
  4. *“Other Assets”*  
*“Aset yang termasuk dalam bagian other assets* (aset lain) sangat bervariasi dalam praktiknya. Di antaranya termasuk aset seperti *long-term prepaid*

*expenses* (biaya dibayar di muka jangka panjang) dan *non-current receivables* (piutang tidak lancar). Aset lain yang mungkin dimasukkan adalah aset dalam dana khusus, properti yang dimiliki untuk dijual, dan kas atau sekuritas yang dibatasi penggunaannya. Perusahaan harus membatasi bagian *other assets* hanya untuk aset yang tidak biasa yang cukup berbeda dari aset yang termasuk dalam kategori tertentu”.

Menurut Kieso *et al.* (2018), “*current assets* adalah kas dan aset lain yang diharapkan perusahaan untuk dikonversi menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi baik dalam satu tahun atau dalam siklus operasi. Siklus operasi adalah waktu rata-rata antara saat perusahaan memperoleh bahan dan persediaan dan saat kas untuk penjualan produk. Siklus beroperasi dari kas melalui persediaan, produksi, piutang, dan kembali ke kas. Ketika beberapa siklus operasi terjadi dalam satu tahun, sebuah perusahaan menggunakan periode satu tahun. Jika siklus operasi lebih dari satu tahun, perusahaan menggunakan periode yang lebih lama. *Current assets* terdiri dari 5 aset utama berikut”:

1. “*Inventories*” (Persediaan)

“*Inventories* (persediaan) adalah aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam kegiatan bisnis biasa, atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam produksi barang yang akan dijual”.

2. “*Prepaid Expenses*” (Biaya Dibayar Di Muka)

“*Prepaid expenses* (biaya dibayar di muka) adalah aset yang dibayar dan dicatat sebelum perusahaan menggunakannya. Ketika biaya dibayar di muka, perusahaan mendebit akun aset untuk menunjukkan layanan atau manfaat yang akan diterimanya di masa depan. Perusahaan memasukkan *prepaid expenses* dalam *current assets* jika perusahaan akan menerima manfaat (umumnya jasa) dalam satu tahun atau siklus operasi. Perusahaan melaporkan *prepaid expenses* sebesar biaya yang belum kadaluwarsa atau belum dikonsumsi”.

3. “*Receivables*” (Piutang)

“*Receivables* (piutang) adalah klaim terhadap pelanggan dan pihak lain atas uang, barang, atau jasa. Untuk *receivables* yang timbul dari transaksi yang tidak biasa (seperti penjualan properti, atau pinjaman kepada rekanan atau karyawan), perusahaan harus mengklasifikasikannya secara terpisah sebagai *non-current receivables*, kecuali penagihan diharapkan dalam waktu satu tahun”.

4. “*Short-Term Investments*” (Investasi Jangka Pendek)

“Perusahaan harus melaporkan *trading securities* (sekuriti perdagangan) sebagai aset lancar. Sekuritas yang diperdagangkan dilaporkan pada nilai wajar”.

5. “*Cash and Cash Equivalents*” (Kas dan Setara Kas)

“*Cash* (kas) adalah aset yang paling likuid dan alat tukar standar serta dasar untuk mengukur dan menghitung semua pos lainnya. Kas terdiri dari koin, mata uang, dan dana yang tersedia di deposito bank. *Cash equivalents* (setara kas) adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang dapat segera dikonversi menjadi kas dalam jumlah yang diketahui dan sangat dekat dengan jatuh temponya sehingga menimbulkan risiko perubahan nilai yang tidak signifikan karena perubahan suku bunga. Umumnya, hanya investasi dengan jatuh tempo asli tiga bulan atau kurang yang memenuhi syarat definisi *cash equivalents*”.

#### 2.4 Pengaruh *Financial Stability* terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Berdasarkan *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)* dalam *Statement on Auditing Standards No. 99* (2002), “manajer menghadapi tekanan untuk melakukan kecurangan ketika stabilitas keuangan atau profitabilitas terancam oleh keadaan ekonomi industri, dan situasi entitas yang beroperasi” (Skousen *et al.*, 2009 dalam Wahyuni dan Budiwitjaksono, 2017). Menurut Skousen *et al.* (2008) dalam Ijudien (2018), “semakin besar rasio perubahan total

aset suatu perusahaan, maka kemungkinan dilakukannya kecurangan laporan keuangan suatu perusahaan semakin tinggi”.

“Jika nilai pertumbuhan aset perusahaan berfluktuasi, manajemen akan tertekan untuk menyesuaikan laporan keuangan agar pertumbuhan aset perusahaan terlihat stabil. Saat itu, para pebisnis selalu dituntut untuk menjaga stabilitas keuangan usahanya. Tekanan ini mengindikasikan kemungkinan terjadinya kecurangan manajemen” (Achmad *et al.*, 2022). Widigio (2013) dalam Achmad *et al.* (2022) menyatakan bahwa “perusahaan dengan variabel total aset yang lebih tinggi cenderung menghasilkan pelaporan keuangan yang curang untuk menarik perhatian investor”.

“Semakin tinggi total aset yang dimiliki perusahaan menunjukkan kekayaan yang dimiliki semakin banyak. Tingginya aset yang dimiliki dapat menarik investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Manajemen perusahaan akan memanipulasi laporan keuangan agar menampilkan pertumbuhan dan performa perusahaan meningkat. Persentase perubahan total aset mengindikasikan adanya kecurangan pada laporan keuangan, karena tingginya persentase perubahan total aset sebagai cara untuk menunjukkan *earning power* perusahaan dan posisi finansial yang lebih kuat” (Suryawan dan Budiasih, 2021). “Pada perusahaan manufaktur, *financial stability* berpengaruh dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Dalam mencapai target finansial, perusahaan akan didorong untuk memanfaatkan metode akuntansi untuk menaikkan atau menurunkan nilai aset perusahaan seperti mekanisme *fair value* dan kapitalisasi aset” (Albrecht, 2002 dalam Tessa *et al.*, 2016 dalam Septriani dan Handayani, 2018).

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa kesimpulan mengenai pengaruh *financial stability* terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Achmad *et al.* (2022) dan Suhendah (2019) menunjukkan bahwa *financial stability* memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Namun, berbeda dengan penelitian Ratmono *et al.* (2020) yang menunjukkan bahwa *financial stability* tidak berpengaruh terhadap

kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis alternatif untuk penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

**Ha<sub>1</sub>: *Financial stability* berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan.**

## **2.5 Leverage**

“*Leverage* adalah seberapa besar pinjaman atau utang yang dimiliki perusahaan” (Ferdinand dan Santosa, 2018). “Rasio *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang” (Hery, 2016 dalam Ramadhani *et al.*, 2018). Menurut Hery (2016) dalam Ramadhani *et al.* (2018), “jenis-jenis pengukuran rasio *leverage* untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya adalah sebagai berikut”:

### 1. “*Debt to Asset Ratio*”

Menurut Ramadhani *et al.* (2018), “rasio *DAR* digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang, atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pembiayaan aset”. “*Debt to Asset Ratio (DAR)* mengukur persentase total aset yang diberikan kreditur. Rasio dihitung dengan membagi total kewajiban (kewajiban lancar dan tidak lancar) dengan total aset. Rasio ini menunjukkan tingkat *leverage* perusahaan” (Weygandt *et al.*, 2019).

### 2. “*Debt to Equity Ratio*”

“*Debt to Equity Ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Rasio ini dihitung dengan hasil dari total utang dibandingkan dengan modal. Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditur dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan” (Ramadhani *et al.*, 2018).

3. “*Long Term Debt to Equity Ratio*”

“*Long Term Debt to Equity Ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang jangka panjang terhadap modal. Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan jumlah dana yang disediakan oleh kreditor jangka panjang dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan” (Ramadhani *et al.*, 2018).

4. “*Times Interest Earned Ratio*”

“*Times interest earned ratio* menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran bunga saat jatuh tempo. *Times interest earned ratio* dihitung dengan membagi jumlah laba bersih, beban bunga, dan beban pajak penghasilan dengan beban bunga” (Weygandt *et al.*, 2019). Menurut Ramadhanni *et al.* (2018), “*times interest earned ratio* menunjukkan sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan dalam membayar bunga. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara laba sebelum bunga dan pajak dengan besarnya beban bunga yang harus dibayarkan” (Ramadhani *et al.*, 2018).

5. “*Operating Income to Liabilities Ratio*”

“*Operating Income to Liabilities Ratio* adalah rasio yang menunjukan kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajiban. Kemampuan perusahaan dalam rasio ini diukur dari jumlah laba operasional. *Operating Income to Liabilities Ratio* dihitung sebagai hasil bagi antara laba operasional dengan total kewajiban” (Ramadhani *et al.*, 2018).

Penelitian ini menggunakan *Debt to Asset Ratio (DAR)* untuk mengukur *leverage* perusahaan. “*Debt to Asset Ratio (DAR)* mengukur persentase total aset yang diberikan kreditor. Rasio dihitung dengan membagi total kewajiban (kewajiban lancar dan tidak lancar) dengan total aset. Rasio ini menunjukkan tingkat *leverage* perusahaan. Rasio ini juga memberikan beberapa indikasi kemampuan perusahaan untuk menahan kerugian tanpa merugikan kepentingan kreditor. Semakin tinggi persentase total kewajiban terhadap total aset, semakin

besar risiko bahwa perusahaan mungkin tidak dapat memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo” (Weygandt *et al.*, 2019).

Menurut Weygandt *et al.* (2019), *Debt to Asset Ratio (DAR)* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$DAR = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Assets}} \quad (2.3)$$

Keterangan:

*DAR* : *Debt to Asset Ratio*

*Total Liabilities* : Jumlah liabilitas yang dimiliki perusahaan

*Total Assets* : Jumlah aset yang dimiliki perusahaan

Menurut Kieso *et al.* (2018), “*liability* (liabilitas) adalah kewajiban kini perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi”. Menurut Kieso *et al.* (2018), “liabilitas dengan tanggal jatuh tempo yang lebih jauh, sebagai suatu aturan, tidak mewakili klaim atas sumber daya perusahaan saat ini. Oleh karena itu, timbul pembagian dasar liabilitas menjadi *current liabilities* dan *non-current liabilities*”.

Menurut Kieso *et al.* (2018) “*current liabilities* (liabilitas lancar) dilaporkan jika salah satu dari dua kondisi tersebut terpenuhi”:

1. “Liabilitas diharapkan diselesaikan dalam siklus operasi normalnya”; atau
2. “Liabilitas diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan”.

Kieso *et al.* (2018) menyatakan bahwa “siklus operasi adalah periode waktu yang berlalu antara perolehan barang dan jasa yang terlibat dalam proses manufaktur dan realisasi kas akhir yang dihasilkan dari penjualan dan penagihan berikutnya. Berikut beberapa contoh dari *current liabilities*”:

1. “*Account Payable*”

“*Account payable* (utang dagang) adalah saldo utang kepada orang lain untuk barang, perlengkapan, atau jasa yang dibeli dengan akun terbuka. *Account payable* timbul karena jeda waktu antara penerimaan jasa atau perolehan hak atas aset dan pembayarannya. Sebagian besar perusahaan mencatat kewajiban untuk pembelian barang setelah menerima barang. Jika hak milik telah berpindah kepada pembeli sebelum penerimaan barang, perusahaan harus mencatat transaksi pada saat peralihan hak” (Kieso *et al.*, 2018).

2. “*Notes Payable*”

“*Notes payable* adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. *Notes payable* mungkin timbul dari pembelian, pembiayaan, atau transaksi lainnya. *Notes payable* kepada bank atau perusahaan pinjaman umumnya timbul dari pinjaman tunai. Perusahaan mengklasifikasikan *notes* sebagai jangka pendek atau jangka panjang, tergantung pada tanggal jatuh tempo pembayaran. *Notes* juga dapat berbunga (*interest-bearing*) atau tanpa bunga (*zero-interest-bearing*)” (Kieso *et al.*, 2018).

3. “*Current Maturities of Long-Term Debt*”

“*Current maturities of long-term debt* (utang jangka panjang yang saat ini jatuh tempo) adalah bagian dari obligasi, *mortgage notes*, dan utang jangka panjang lainnya yang jatuh tempo pada tahun fiskal selanjutnya. Perusahaan mengecualikan *currently maturing long-term debts* dari *current liabilities* jika perusahaan ingin” (Kieso *et al.*, 2018):

- a. “Pensiun oleh aset yang diakumulasikan untuk tujuan ini yang belum benar-benar ditampilkan sebagai aset lancar”;
- b. “Dibiayai kembali, atau dipensiunkan dari hasil penerbitan utang jangka panjang yang baru”; atau
- c. “Dikonversi menjadi saham biasa”.

“Ketika hanya sebagian dari utang jangka panjang yang harus dibayar dalam 12 bulan ke depan, perusahaan melaporkan bagian jatuh tempo dari utang jangka panjang sebagai *current liability* dan sisanya sebagai *long-term*

*debt* (utang jangka panjang). Namun, perusahaan harus mengklasifikasikan sebagai kewajiban lancar yang jatuh tempo sesuai permintaan (dapat ditarik kembali oleh kreditur) atau akan jatuh tempo sesuai permintaan dalam satu tahun atau siklus operasi. *Liabilities* menjadi dapat ditarik kembali oleh kreditur ketika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian utang” (Kieso *et al.*, 2018).

4. “*Short-Term Obligations Expected to be Refinanced*”

“*Short-term obligation* adalah utang yang dijadwalkan untuk jatuh tempo dalam waktu satu tahun setelah tanggal laporan posisi keuangan perusahaan atau dalam siklus operasi normalnya. *Short-term obligations expected to be refinanced* adalah utang jangka pendek yang diekspektasikan akan dibiayai kembali” (Kieso *et al.*, 2018).

5. “*Dividends Payable*”

“*Cash dividend payable* adalah jumlah yang terutang oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya sebagai akibat dari otorisasi dewan direksi (atau dalam kasus lain, suara pemegang saham)” (Kieso *et al.*, 2018).

6. “*Customer Advances and Deposits*”

“*Current liabilities* dapat mencakup setoran tunai yang dapat dikembalikan yang diterima dari pelanggan dan karyawan. Perusahaan dapat menerima simpanan dari pelanggan untuk menjamin kinerja kontrak atau layanan atau sebagai jaminan untuk menutupi pembayaran kewajiban masa depan yang diharapkan” (Kieso *et al.*, 2018).

7. “*Unearned Revenue*”

“*Unearned revenue* adalah perusahaan yang telah menerima pendapatan dibayar di muka sebelum menyediakan barang atau jasa. Perusahaan memperhitungkan *unearned revenues* ketika” (Kieso *et al.*, 2018):

- a. “Perusahaan menerima uang muka, mendebit kas, dan mengkredit akun kewajiban lancar yang mengidentifikasi sumber pendapatan diterima di muka”.
- b. “Perusahaan mengakui pendapatan, mendebit akun pendapatan diterima di muka, dan mengkredit akun pendapatan”.

8. “*Sales and Value-Added Taxes Payable*”

“Pajak konsumsi umumnya berupa pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai (PPN). Tujuan dari pajak ini adalah untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah yang serupa dengan pajak penghasilan perusahaan atau pribadi. Kedua pajak ini mencapai tujuan yang sama, yaitu untuk mengenakan pajak kepada konsumen akhir dari barang atau jasa” (Kieso *et al.*, 2018).

9. “*Income Tax Payable*”

“Sebagian besar pajak penghasilan bervariasi secara proporsional dengan jumlah pendapatan tahunan. Dengan menggunakan informasi dan saran terbaik yang tersedia, bisnis harus menyiapkan *income tax return* (pengembalian pajak penghasilan) dan menghitung *income taxes payable* (pajak penghasilan) yang terutang yang dihasilkan dari operasi periode berjalan” (Kieso *et al.*, 2018).

10. “*Employee-Related Liabilities*”

“Perusahaan melaporkan sebagai jumlah kewajiban lancar yang terutang kepada karyawan untuk gaji atau upah pada akhir periode akuntansi. Selain itu, perusahaan sering juga melaporkan sebagai kewajiban lancar hal-hal yang terkait dengan kompensasi karyawan seperti potongan gaji, ketidakhadiran yang dikompensasi, dan bonus” (Kieso *et al.*, 2018).

Kieso *et al.* (2018) menyatakan, “*non-current liabilities* (kewajiban jangka panjang) terdiri dari arus keluar sumber daya yang timbul dari kewajiban saat ini yang tidak terutang dalam satu tahun atau siklus operasi. Contoh dari *non-current liabilities* adalah *bonds payable* (utang obligasi), *long-term notes payable*, *mortgage payable*, *pension liabilities*, dan *lease liabilities*. Secara umum, *non-current liabilities* terdiri dari tiga jenis”:

1. “Kewajiban yang timbul dari situasi pembiayaan tertentu, seperti penerbitan obligasi, *long-term lease obligations* (kewajiban sewa jangka panjang), dan *long-term notes payable* (wesel bayar jangka panjang)”.

2. “Kewajiban yang timbul dari operasi normal perusahaan, seperti *pension obligations* (kewajiban pensiun) dan *deferred income tax liabilities* (kewajiban pajak penghasilan tangguhan)”.
3. “Kewajiban yang bergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan untuk mengkonfirmasi jumlah yang harus dibayar, atau penerima pembayaran, atau tanggal pembayaran, seperti *service or product warranties* (jaminan layanan atau produk), *environmental liabilities* (kewajiban lingkungan), dan restrukturisasi, sering disebut sebagai *provisions*”.

## **2.6 Pengaruh *Leverage* terhadap Kecurangan Laporan Keuangan**

“Semakin tinggi tingkat *leverage*, perusahaan akan cenderung melaporkan profitabilitas yang tinggi sekaligus untuk menutupi utangnya” (Zainudin & Hashim, 2016 dalam Ferdinand dan Santosa, 2018). Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Ferdinand dan Santosa (2018), “ada potensi untuk mentransfer kekayaan dari *debtholders* kepada pemegang saham dan manajer di perusahaan yang memiliki tingkat ketergantungan utang yang tinggi seiring dengan peningkatan *leverage*”. “Manajemen perusahaan dapat memanipulasi laporan keuangannya jika ada kebutuhan untuk memenuhi perjanjian utang tertentu. Lebih lanjut, *leverage* yang lebih tinggi terkait dengan potensi pelanggaran perjanjian utang yang lebih tinggi dan penurunan kemampuan untuk memperoleh tambahan modal melalui utang” (Nia, 2015 dalam Ferdinand dan Santosa, 2018). “Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa tingkat *leverage* yang lebih tinggi dapat meningkatkan terjadinya kecurangan pelaporan keuangan” (Ferdinand dan Santosa, 2018).

“Perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang besar secara tidak langsung akan memberikan tekanan kepada manajer sebagai pengelola perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Ekspektasi terhadap prestasi kinerja manajer yang tinggi ini akan membuat manajer melakukan usaha untuk menutupi, menyembunyikan informasi yang sebenarnya tentang kinerja perusahaan. Ini

mengakibatkan secara tidak langsung mengorbankan kepentingan prinsipal. Tekanan ini menyebabkan terjadinya *fraudulent financial statement* yang semakin besar” (Suhendah, 2019).

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa kesimpulan mengenai pengaruh *leverage* terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugroho *et al.* (2019) menunjukkan *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Namun, berbeda dengan penelitian Suhendah (2019) yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis alternatif untuk penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

**Ha<sub>2</sub>: *Leverage* berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan.**

## **2.7 Nature of Industry**

“*Nature of industry* dalam teori *fraud triangle* menunjukkan sifat alami operasional sebuah industri yang memberikan kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan dengan mengestimasi saldo akun secara subjektif. Keleluasaan subjektif manajemen menentukan nilai cadangan kerugian penurunan nilai piutang dalam komponen piutang bersih dianggap sebagai *opportunity* sebagai akibat dari aktivitas *nature of industry*” (Utama *et al.*, 2018). Berdasarkan *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)* dalam *Statement on Auditing Standards No. 99* (2002), “sifat industri (*nature of industry*) atau operasi entitas menyediakan peluang untuk terlibat dalam penyusunan pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan, yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut”:

1. “Transaksi signifikan dengan pihak yang berelasi yang tidak dilakukan dalam kondisi dan ketentuan bisnis normal atau dengan entitas yang berelasi yang tidak diaudit atau diaudit oleh KAP lain”.
2. “Kondisi atau kemampuan keuangan yang kuat untuk mendominasi suatu sektor industri tertentu yang memungkinkan entitas untuk mendikte kondisi atau ketentuan kepada pemasok atau pelanggan, yang dapat mengakibatkan

transaksi yang tidak semestinya atau transaksi yang tidak dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi”.

3. “Aset, liabilitas, pendapatan, atau biaya yang didasarkan pada estimasi signifikan yang melibatkan pertimbangan subjektif atau ketidakpastian yang sulit untuk mendukung hasil yang disajikan”.
4. “Transaksi yang signifikan, tidak biasa, atau mengandung kompleksitas yang tinggi, terutama yang terjadi menjelang akhir periode pelaporan, yang menimbulkan pertanyaan sulit tentang substansi melebihi bentuk”.
5. “Operasi signifikan yang berlokasi atau dilakukan di lintas batas internasional dalam yurisdiksi yang memiliki perbedaan lingkungan dan budaya bisnis”.
6. “Rekening bank, atau anak perusahaan atau kantor cabang yang signifikan di yurisdiksi yang merupakan *tax-haven* yang tampaknya tidak dilandasi oleh pertimbangan bisnis yang jelas”.

Menurut Iqbal dan Murtanto (2016) dalam Ijudien (2018), “salah satu cara untuk mengukur *nature of industry* adalah dengan menggunakan *receivable* atau piutang”. Skousen et al. (2009) dalam Irwandi et al. (2019) menyatakan, “*ratio of changes in receivables (REV)* dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$REV = \frac{Receivables_t}{Sales_t} - \frac{Receivables_{t-1}}{Sales_{t-1}} \quad (2.4)$$

Keterangan:

*REV* : Ratio of changes in receivables

*Receivable<sub>t</sub>* : Jumlah piutang usaha bersih pada tahun t

*Receivable<sub>t-1</sub>* : Jumlah piutang usaha bersih pada 1 tahun sebelum tahun t

*Sales<sub>t</sub>* : Jumlah penjualan pada tahun t

*Sales<sub>t-1</sub>* : Jumlah penjualan pada 1 tahun sebelum tahun

Weygandt *et al.* (2019) menyatakan, “piutang mengacu pada jumlah yang harus dibayar dari individu dan perusahaan. Piutang adalah klaim yang diharapkan dapat ditagih secara tunai. Piutang diklasifikasikan sebagai”:

1. “*Account Receivable*”

“*Account receivable* adalah jumlah yang harus dibayar pelanggan secara kredit. *Account receivable* dihasilkan dari penjualan barang dan jasa. Perusahaan umumnya mengharapkan untuk menagih piutang dalam waktu 30 sampai 60 hari. *Account receivable* biasanya merupakan jenis klaim paling signifikan yang dipegang oleh sebuah perusahaan” (Weygandt *et al.*, 2019).

2. “*Notes Receivable*”

“*Notes receivable* adalah janji tertulis (yang dibuktikan dengan instrumen formal) untuk jumlah yang akan diterima. Wesel biasanya memerlukan pengumpulan bunga dan berlaku untuk jangka waktu 60-90 hari atau lebih. *Notes receivable* dan *account receivable* yang dihasilkan dari transaksi penjualan sering disebut *trade receivables* (piutang usaha)” (Weygandt *et al.*, 2019).

3. “*Other Receivables*”

“*Other receivables* termasuk *non-trade receivables* (piutang non-usaha) seperti *interest receivable* (piutang bunga), *loans to company officers* (pinjaman kepada pegawai perusahaan), *advances to employees* (uang muka kepada karyawan), dan *income taxes refundable* (pajak penghasilan yang dapat dikembalikan). *Other receivables* umumnya tidak dihasilkan dari operasi bisnis. Oleh karena itu, *other receivables* umumnya diklasifikasikan dan dilaporkan sebagai pos terpisah dalam *statement of financial position* (laporan posisi keuangan)” (Weygandt *et al.*, 2019).

Menurut Kieso *et al.* (2018), “*receivables* (piutang) adalah klaim terhadap pelanggan dan pihak lain atas uang, barang, atau jasa. *Receivables* diklasifikasikan lebih lanjut dalam laporan posisi keuangan sebagai”:

1. “*Trade Receivables* (Piutang Usaha)”

“Perusahaan dapat mengklasifikasikan sebagai *trade receivables* ketika pelanggan berutang kepada perusahaan atas sejumlah barang yang dibeli atau jasa yang diberikan. Untuk piutang yang timbul dari transaksi yang tidak biasa (seperti penjualan properti, atau pinjaman kepada rekanan atau karyawan), perusahaan harus mengklasifikasikannya secara terpisah sebagai piutang jangka panjang, kecuali penagihan diharapkan dalam waktu satu tahun” (Kieso *et al.*, 2018).

2. “*Non-Trade Receivables*”

“*Non-trade receivables* timbul dari berbagai transaksi. Beberapa contoh *non-trade receivables* adalah *advances* (uang muka) untuk karyawan, *advances* (uang muka) untuk anak perusahaan, *deposits* (uang jaminan) yang dibayarkan untuk menutup kemungkinan kerusakan atau kerugian, *deposits* (uang jaminan) yang dibayarkan sebagai jaminan kinerja atau pembayaran, piutang dividen dan bunga, dan berbagai klaim (klaim terhadap perusahaan asuransi; klaim terhadap terdakwa di bawah gugatan; klaim terhadap badan pemerintah untuk pengembalian pajak; klaim terhadap pengangkut umum untuk barang yang rusak atau hilang; klaim terhadap kreditur atas barang yang dikembalikan, rusak, atau hilang; dan klaim terhadap pelanggan untuk barang yang dapat dikembalikan)” (Kieso *et al.*, 2018).

Weygandt *et al.* (2019) menyatakan bahwa, “perusahaan jasa mencatat *receivable* ketika perusahaan melakukan layanan secara kredit. Perusahaan dagang mencatat *receivable* pada penjualan barang dagangan secara kredit. Penjual dapat menawarkan persyaratan yang mendorong pembayaran lebih awal dengan memberikan diskon yang mengurangi *receivable*. *Sales returns* (retur penjualan) juga mengurangi *receivable*”.

“Ketika perusahaan melakukan penjualan secara kredit, maka perusahaan akan melakukan pencatatan sebagai berikut”:

<i>Account Receivable</i>	<i>xxx</i>
<i>Sales Reveue</i>	<i>xxx</i>

“Ketika perusahaan menerima *sales returns* (retur penjualan) dari pelanggan, maka perusahaan akan melakukan pencatatan sebagai berikut”:

<i>Sales Returns and Allowances</i>	<i>xxx</i>	
<i>Account Receivable</i>		<i>xxx</i>

“Ketika perusahaan memberikan diskon dari persyaratan penjualan, maka perusahaan akan melakukan pencatatan sebagai berikut”:

<i>Cash</i>	<i>xxx</i>	
<i>Sales Discounts</i>	<i>xxx</i>	
<i>Account Receivable</i>		<i>xxx</i>

Menurut Weygandt *et al.* (2019), “setiap pelanggan harus memenuhi persyaratan kredit penjual sebelum penjualan kredit disetujui. Namun, beberapa piutang dapat menjadi tidak tertagih. Terdapat 2 metode yang digunakan dalam akuntansi untuk *uncollectible accounts* (piutang tak tertagih)”:

1. “*Direct Write-Off Method* (Metode Penghapusan Langsung)”

“Dengan metode *direct write-off*, ketika perusahaan menentukan akun tertentu tidak dapat ditagih, perusahaan membebankan kerugian tersebut ke *bad debt expense* (beban piutang tak tertagih). Dengan metode ini, *bad debt expense* hanya akan menunjukkan kerugian aktual dari tidak tertagihnya piutang. Penggunaan metode *direct write-off* dapat mengurangi relevansi *income statement* (laporan laba rugi) dan *statement of financial position* (laporan posisi keuangan). Dengan metode *direct write-off*, perusahaan sering mencatat *bad debt expense* dalam periode yang berbeda dengan periode perusahaan mencatat *revenue* (pendapatan). Metode ini tidak berusaha untuk mencocokkan *bad debt expense* dengan *sales revenue* (pendapatan penjualan) dalam *income statement*. Metode *direct write-off* juga tidak menunjukkan *accounts receivable* dalam *statement of financial position* sebesar jumlah

yang sebenarnya diharapkan akan diterima oleh perusahaan. Akibatnya, kecuali kerugian piutang tak tertagih tidak signifikan, metode *direct write-off* tidak dapat diterima untuk tujuan pelaporan keuangan” (Weygandt *et al.*, 2019).

“Ketika perusahaan akan melakukan pencatatan piutang tak tertagih dengan metode *direct write-off*, maka perusahaan akan melakukan pencatatan sebagai berikut” (Weygandt *et al.*, 2019):

<i>Bad Debt Expense</i>	<i>Account Receivable</i>	<i>xxx</i>	<i>xxx</i>
-------------------------	---------------------------	------------	------------

2. “*Allowance Method* (Metode Penyisihan)

“Metode *allowance* untuk piutang tak tertagih melibatkan estimasi *uncollectible accounts* (piutang tak tertagih) pada setiap akhir periode. Metode ini memberikan pencocokan *expenses* (biaya) yang lebih baik dengan *revenue* (pendapatan) pada *income statement*. Metode ini juga memastikan bahwa perusahaan menyatakan piutang pada *statement of financial position* pada nilai realisasi kas (bersih). Nilai realisasi kas (bersih) adalah jumlah bersih yang diharapkan akan diterima perusahaan secara tunai. Nilai ini tidak termasuk jumlah yang diperkirakan perusahaan tidak akan tertagih. Dengan demikian, metode ini mengurangi piutang dalam *statement of financial position* sebesar jumlah *estimated uncollectible receivables* (estimasi piutang tak tertagih)” (Weygandt *et al.*, 2019).

“Perusahaan harus menggunakan metode *allowance* untuk tujuan pelaporan keuangan ketika piutang tak tertagih jumlahnya material. Metode ini memiliki tiga fitur penting” (Weygandt *et al.*, 2019):

- a. “Perusahaan memperkirakan piutang tak tertagih. Perusahaan mencocokkan *estimated expense* (perkiraan biaya) ini dengan *revenues* (pendapatan) pada periode akuntansi yang sama di mana mereka mencatat pendapatan” (Weygandt *et al.*, 2019).

- b. “Perusahaan mendebit taksiran piutang tak tertagih ke *bad debt expense* dan mengkreditkannya ke *allowance for doubtful accounts* (penyisihan piutang tak tertagih) melalui jurnal penyesuaian pada akhir setiap periode. *allowance for doubtful accounts (AFDA)* adalah *contra account* dari *account receivable*”.
- c. “Ketika perusahaan menghapus akun tertentu, mereka mendebit piutang tak tertagih yang sebenarnya ke *allowance for doubtful accounts (AFDA)* dan mengkredit jumlah itu ke *accounts receivable*” (Weygandt *et al.*, 2019).

“Ketika perusahaan akan melakukan pencatatan *estimated* dengan metode *allowance*, maka perusahaan akan melakukan pencatatan sebagai berikut” (Weygandt *et al.*, 2019):

<i>Bad Debt Expense</i>	xxx
<i>Account Receivable</i>	xxx

“Perusahaan melaporkan *bad debt expense* dalam *income statement* sebagai *operating expense* (beban operasi). Perusahaan mencatat beban pada tahun yang sama ketika penjualan dilakukan. *Allowance for doubtful accounts (AFDA)* menunjukkan perkiraan jumlah klaim pada pelanggan yang diperkirakan perusahaan tidak akan tertagih di masa depan. Saldo kredit dalam akun penyisihan akan menyerap penghapusan tertentu pada saat terjadi. Perusahaan mengurangi akun penyisihan dari *account receivable* di bagian *current assets* pada *statement of financial position*. Perusahaan tidak menutup *allowance for doubtful accounts* pada akhir tahun buku” (Weygandt *et al.*, 2019).

“Ketika perusahaan telah kehabisan semua cara untuk mengumpulkan akun yang telah lewat jatuh tempo dan penagihan tampaknya tidak mungkin, perusahaan menghapus akun tersebut. Untuk mencegah penghapusan prematur atau tidak sah, personel manajemen yang berwenang harus secara resmi

menyetujui setiap penghapusan. Untuk menjaga pemisahan tugas, karyawan yang diberi wewenang untuk menghapus akun tidak boleh memiliki tanggung jawab sehari-hari terkait dengan kas atau piutang” (Weygandt *et al.*, 2019).

“Perusahaan tidak menambah *bad debt expense* pada saat terjadi penghapusan. Berdasarkan metode *allowance*, perusahaan mendebit setiap penghapusan piutang tak tertagih ke akun penyisihan. Entri untuk mencatat penghapusan piutang tak tertagih akan mengurangi *account receivable* dan *allowance for doubtful accounts*” (Weygandt *et al.*, 2019).

“Ketika perusahaan melakukan penghapusan *account receivable* dengan metode *allowance*, maka perusahaan melakukan pencatatan sebagai berikut” (Weygandt *et al.*, 2019):

<i>Allowance for Doubtful Accounts</i>	xxx	
<i>Account Receivable</i>		xxx

*Recovery of an uncollectible account* (pemulihan akun yang tidak dapat ditagih) adalah ketika perusahaan menagih dari pelanggan setelah menghapus akun tersebut sebagai tidak tertagih. Perusahaan membuat 2 entri untuk mencatat pemulihan piutang tak tertagih” (Weygandt *et al.*, 2019):

- a. “Membalikkan entri akun yang dihapus untuk memulihkan akun pelanggan”.

“Ketika perusahaan memulihkan akun piutang pelanggan yang telah dihapus, maka perusahaan akan melakukan pencatatan sebagai berikut” (Weygandt *et al.*, 2019):

<i>Account Receivable</i>	xxx	
<i>Allowance for Doubtful Accounts</i>		xxx

- b. “Menjurnal penagihan dengan cara biasa”.

“Ketika perusahaan memulihkan akun piutang pelanggan yang telah dihapus, maka perusahaan akan melakukan pencatatan sebagai berikut” ”  
 (Weygandt *et al.*, 2019):

Cash	xxx
Account Receivable	xxx

Berdasarkan IAI dalam PSAK 72, “pendapatan (*revenue*) adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas normal entitas. Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomis suatu periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan dalam ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal”.

Menurut Weygandt *et al.* (2019), “*net sales* (penjualan bersih) adalah *sales revenue* (pendapatan penjualan) setelah dikurangi dengan *sales return and allowances* (retur penjualan) dan *sales discount* (diskon penjualan). *Sales return and allowances* adalah penerimaan kembali barang dari pembeli kepada penjual atau pengurangan harga atas barang yang telah dijual. *Sales discount* merupakan potongan harga yang diberikan kepada pelanggan atau pembeli yang membeli dengan volume tertentu atau kepada pembeli yang membayar lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan”.

Menurut Kieso *et al.* (2020), “prinsip pengakuan pendapatan menunjukkan bahwa perusahaan harus mengakui pendapatan ketika memenuhi *performance obligation* dengan mentransfer barang atau jasa kepada pelanggan”. “Konsep perubahan kendali adalah faktor penentu dalam menentukan kapan *performance obligation* dipenuhi dan piutang usaha diakui. Berikut adalah beberapa indikator kunci yang digunakan untuk menentukan bahwa perusahaan telah memindahkan dan pelanggan telah memperoleh kendali atas jasa atau barang”.

1. “Perusahaan berhak atas pembayaran dari pelanggan. Jika pelanggan wajib membayar, itu menandakan bahwa kontrol telah berpindah ke pelanggan”.

2. “Perusahaan telah memberikan hak legal kepada pelanggan. Jika pelanggan memiliki hak legal atas barang tersebut, ini menunjukkan bahwa kontrol telah berpindah ke pelanggan”.
3. “Perusahaan telah mengalihkan kepemilikan fisik atas barang tersebut. Jika pelanggan memiliki kepemilikan fisik, ini menunjukkan bahwa kendali telah berpindah ke pelanggan”.
4. “Perusahaan tidak lagi memiliki risiko dan manfaat kepemilikan barang yang signifikan. Jika pelanggan sekarang memiliki risiko dan manfaat kepemilikan yang signifikan, ini menunjukkan bahwa kendali telah berpindah ke pelanggan”.
5. “Pelanggan telah menerima aset tersebut”.

## **2.8 Pengaruh *Nature of Industry* terhadap Kecurangan Laporan Keuangan**

“*Nature of industry* menyediakan peluang untuk kecurangan laporan keuangan yang disebabkan oleh transaksi signifikan dengan pihak berelasi yang tidak dilakukan dalam kondisi dan ketentuan bisnis normal. Transaksi yang signifikan, tidak bisa atau mengandung kompleksitas yang tinggi, terutama yang terjadi menjelang akhir periode pelaporan yang menimbulkan pertanyaan sulit. Kemudian aset, liabilitas, pendapatan atau biaya yang didasarkan pada estimasi yang melibatkan pertimbangan subjektif atau ketidakpastian yang sulit untuk mendukung hasil yang disajikan” (AICPA, 2002 dalam Apriyuliana, 2017 dalam Ijudien, 2018).

Berdasarkan IAPI dalam SA 240 (2021), “penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk membuat sejumlah pertimbangan atau asumsi yang memengaruhi estimasi akuntansi signifikan dan untuk memantau kewajaran estimasi tersebut secara berkelanjutan. Pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan sering dicapai melalui kesalahan penyajian estimasi akuntansi yang disengaja. Hal ini dapat dicapai dengan, sebagai contoh, menyajikan secara lebih rendah atau lebih tinggi seluruh provisi atau cadangan yang didesain untuk baik meratakan pendapatan selama dua atau lebih periode akuntansi, atau untuk

mencapai suatu tingkat pendapatan yang ditargetkan untuk menyestakan pengguna laporan keuangan dengan cara memengaruhi persepsi mereka atas kinerja dan profitabilitas entitas”. Irwandi *et al.* (2019) menyatakan bahwa “dalam laporan keuangan terdapat akun-akun tertentu yang saldonya ditentukan oleh perusahaan berdasarkan suatu perkiraan, seperti akun-akun tidak tertagih dan akun persediaan usang”. Summers & Sweeney (1998) dalam Irwandi *et al.* (2019) menjelaskan bahwa “piutang dan persediaan memerlukan penilaian subjektif dalam memperkirakan piutang tak tertagih. Manajer dapat memanipulasi laporan keuangan dengan memainkan akun piutang dan persediaan”.

Menurut Ritonga dan Apriyani (2019), “hal lain perihal piutang dan persediaan adalah ketika perusahaan mengalami peningkatan pada kedua akun tersebut, karena dengan adanya peningkatan piutang dari tahun sebelumnya akan menjadi indikasi bahwa perputaran kas yang dimiliki perusahaan dalam keadaan tidak baik. Demikian pula dengan peningkatan persediaan, dalam keadaan tersebut kas yang dimiliki perusahaan mengendap dalam bentuk persediaan. Artinya banyaknya piutang dan persediaan perusahaan akan mengurangi jumlah kas yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan operasionalnya. Perputaran kas yang tidak baik dan terbatasnya kas akan mendorong manajemen untuk melakukan kecurangan dan memanipulasi laporan keuangan agar kinerja perusahaan tetap terlihat baik dimata investor atau pihak luar lainnya”.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa kesimpulan mengenai pengaruh *nature of industry* terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Irwandi *et al.* (2019) serta Ritonga dan Apriyani (2019) menunjukkan *nature of industry* memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Namun, berbeda dengan penelitian Ijudien (2018) yang menunjukkan bahwa *nature of industry* tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis alternatif untuk penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

**Ha<sub>3</sub>: *Nature of industry* berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan.**

## 2.9 Likuiditas

“Likuiditas merupakan suatu gambaran atau cerminan mengenai ketersediaan dana yang dimiliki perusahaan untuk digunakan sebagai pembayaran atau pemenuhan utang yang akan segera jatuh tempo” (Suhendah, 2019). Menurut Kieso *et al.* (2018), “likuiditas menggambarkan jumlah waktu yang diharapkan untuk berlalu sampai aset direalisasikan atau diubah menjadi uang tunai atau sampai kewajiban harus dibayar. Kreditur tertarik pada rasio likuiditas jangka pendek, seperti *ratio of cash* (rasio kas atau mendekati kas) dengan *short-term liabilities* (kewajiban jangka pendek). Rasio ini menunjukkan apakah perusahaan, akan memiliki sumber daya untuk membayar kewajiban saat ini dan yang akan jatuh tempo. Demikian pula, pemegang saham menilai likuiditas untuk mengevaluasi kemungkinan dividen tunai di masa depan atau pembelian kembali saham. Secara umum, semakin besar likuiditas, semakin rendah risiko kegagalannya”.

“Likuiditas memengaruhi fleksibilitas keuangan perusahaan, yang mengukur kemampuan perusahaan untuk mengambil tindakan efektif untuk mengubah jumlah dan waktu arus kas sehingga dapat menanggapi kebutuhan dan peluang yang tidak terduga. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin menjadi begitu terbebani dengan utang atau sangat tidak fleksibel secara finansial, sehingga memiliki sedikit atau tidak ada sumber uang tunai untuk membiayai ekspansi atau untuk melunasi utang yang jatuh tempo. Perusahaan dengan tingkat fleksibilitas keuangan yang tinggi lebih mampu bertahan di masa-masa sulit, pulih dari kemunduran yang tidak terduga, dan memanfaatkan peluang investasi yang menguntungkan dan tidak terduga. Umumnya, semakin besar fleksibilitas keuangan suatu perusahaan, semakin rendah risiko kegagalannya” (Kieso *et al.*, 2018).

Weygandt *et al.* (2019) menyatakan bahwa “rasio likuiditas mengukur kemampuan jangka pendek perusahaan untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo dan untuk memenuhi kebutuhan kas yang tidak terduga. Kreditur jangka

pendek seperti bankir dan pemasok sangat tertarik untuk menilai likuiditas. Rasio yang dapat kita gunakan untuk menentukan kemampuan membayar utang jangka pendek perusahaan terdiri dari”:

1. “*Current Ratio*”

“*Current ratio (CR)* adalah ukuran yang banyak digunakan untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan dan kemampuan membayar utang jangka pendek. Rasio dihitung dengan membagi *current assets* (aset lancar) dengan *current liabilities* (kewajiban lancar)” (Weygandt *et al.*, 2019).

2. “*Acid-Test Ratio*”

“*Acid-test (quick) ratio* adalah ukuran likuiditas jangka pendek langsung perusahaan. Rasio ini dihitung dengan membagi jumlah dari *cash* (kas), *short-term investments* (investasi jangka pendek), dan *net accounts receivable* (piutang bersih) dengan *current liabilities* (kewajiban lancar). *Cash* (kas), *short-term investments* (investasi jangka pendek), dan *net accounts receivable* (piutang bersih) sangat likuid dibandingkan dengan *inventory* (persediaan) dan *prepaid expenses* (biaya dibayar di muka). *Inventory* mungkin tidak siap untuk dijual, dan *prepaid expenses* mungkin tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Oleh karena itu, *acid-test ratio* mengukur likuiditas langsung” (Weygandt *et al.*, 2019).

3. “*Accounts Receivable Turnover*”

“Likuiditas dapat diukur dengan seberapa cepat sebuah perusahaan dapat mengubah aset tertentu menjadi kas. Rasio yang digunakan untuk menilai likuiditas piutang adalah *account receivable turnover* (perputaran piutang). Rasio ini mengukur berapa kali rata-rata perusahaan mengumpulkan piutang selama periode tersebut. *Account receivable turnover* dihitung dengan membagi *net credit sales* (penjualan bersih dikurangi penjualan tunai) dengan *average net account receivable* (rata-rata piutang bersih)” (Weygandt *et al.*, 2019).

4. “*Inventory Turnover*”

“*Inventory turnover* mengukur berapa kali rata-rata *inventory* (persediaan) terjual selama periode tersebut. Tujuannya adalah untuk mengukur likuiditas

*inventory*. *Inventory turnover* dihitung dengan membagi *cost of goods sold* (harga pokok penjualan) dengan *average inventory* (persediaan rata-rata)” (Weygandt *et al.*, 2019).

Penelitian ini menggunakan *current ratio* (CR) untuk mengukur likuiditas. “*Current Ratio* (CR) adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki perusahaan” (Nugroho *et al.*, 2018). Menurut Kieso (2018), *current ratio* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$CR = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}} \quad (2.5)$$

Keterangan:

- CR* : *Current Ratio*  
*Current Assets* : Jumlah aset lancar yang dimiliki perusahaan  
*Current Liabilities* : Jumlah liabilitas lancar yang dimiliki perusahaan

Berdasarkan IAI dalam PSAK 1 (2022), “entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar, jika:

1. Entitas memperkirakan akan merealisasikan aset, atau memiliki intensi untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal;
2. Entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan;
3. Entitas mengharapkan akan merealisasi aset dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau
4. Aset merupakan kas atau setara kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan”.

Menurut IAI dalam PSAK 1 (2021), “entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika:

1. Entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal;
2. Entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan;

3. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau
4. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menanggihkan penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan. Persyaratan liabilitas yang dapat mengakibatkan diselesaikannya liabilitas tersebut dengan menerbitkan instrumen ekuitas, sesuai dengan pilihan pihak lawan, tidak berdampak terhadap klasifikasi liabilitas tersebut”.

### **2.10 Pengaruh Likuiditas terhadap Kecurangan Laporan Keuangan**

“Likuiditas perusahaan yang rendah menyebabkan terjadinya tindakan kecurangan laporan keuangan yang semakin tinggi. Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang rendah berarti perusahaan memiliki jumlah kas lancar yang semakin kecil, dan perusahaan mengalami kesulitan untuk melunasi utang jangka pendek. Ini berarti perusahaan juga mengalami kesulitan untuk membayar dividen tunai. Ini menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan investor dan kreditor terhadap perusahaan” (Suhendah, 2019).

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa kesimpulan mengenai pengaruh likuiditas terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugroho *et al.* (2018) menunjukkan likuiditas memiliki pengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Namun, berbeda dengan penelitian Suhendah (2019) yang menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis alternatif untuk penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

**Ha<sub>4</sub>: Likuiditas berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.**

### **2.11 Corporate Governance**

Ghozali (2020) menyatakan, “*corporate governance* (tata kelola perusahaan) adalah kumpulan mekanisme, proses, dan hubungan yang dengannya perusahaan dikendalikan dan dioperasikan”. Menurut *Forum for Corporate Governance in*

*Indonesia* (2001) dalam Priswita dan Taqwa (2019), “*corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan”. Solomon (2020) menyatakan bahwa “*corporate governance is the system of checks and balances, both internal and external to companies, which ensures that companies discharge their accountability to all their stakeholders and act in a socially responsible way in all areas of their responsible way in all areas of their business activity*” yang diartikan bahwa “*corporate governance* adalah sistem cek dan saldo, baik internal maupun eksternal untuk perusahaan, yang memastikan bahwa perusahaan melepaskan akuntabilitas mereka kepada semua pemangku kepentingan mereka dan bertindak dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial di semua bidang kegiatan bisnis mereka”.

“*Corporate governance* merupakan suatu upaya perusahaan agar dapat menjalankan usahanya secara baik dengan memperhatikan hak dan kewajiban bagi semua pihak yang berkepentingan” (Sari dan Husadha, 2020). “Struktur dan prinsip tata kelola mengidentifikasi distribusi hak dan tanggung jawab di antara peserta yang berada di perusahaan (seperti dewan direksi, manajer, pemegang saham, kreditur, auditor, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya) serta memasukkan aturan dan prosedur untuk membuat keputusan dalam perusahaan. Tata kelola perusahaan diperlukan karena kemungkinan konflik kepentingan antara pemangku kepentingan, terutama antara pemegang saham dan manajemen atas atau di antara pemegang saham” (Ghozali, 2021). “*The role of corporate governance is to protect and advance the interests of shareholders through setting the strategic direction of a company and appointing and monitoring capable management to achieve this*” yang diartikan “peran *corporate governance* adalah untuk melindungi dan memajukan kepentingan pemegang saham melalui penetapan arah strategis suatu perusahaan serta menunjuk dan

memantau manajemen yang mampu untuk mencapai hal ini” (Walker Review, 2009 dalam Solomon, 2020).

Menurut Salim (2017) dalam Priswita dan Taqwa (2019), “beberapa mekanisme *corporate governance*, seperti mekanisme internal yaitu kepemilikan manajerial dan dewan komisaris serta mekanisme eksternal yaitu komite audit dan kepemilikan institusional diharapkan dapat mengatasi masalah keagenan dan dapat mengurangi terjadinya kecurangan laporan keuangan”. “Penerapan *corporate governance* dapat dilakukan melalui mekanisme *monitoring* untuk menyelaraskan berbagai kepentingan salah satunya memperbesar kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen (*managerial ownership*)” (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Jao dan Pagalung, 2011 dalam Suheny, 2019). Pada penelitian ini, *corporate governance* dihitung dengan menggunakan kepemilikan manajerial (*managerial ownership*). Menurut Syafitri *et al.* (2021), kepemilikan manajerial dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Kepemilikan Manajerial (MO)} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki manajemen}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \quad (2.6)$$

Keterangan:

Jumlah saham yang dimiliki manajemen	: Jumlah saham yang dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi perusahaan
Jumlah saham yang beredar	: Jumlah saham perusahaan yang beredar

“Kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan, misalnya direktur dan komisaris” (Majid, 2016 dalam Rumapea *et al.*, 2022). Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar

pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, “Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi”. Menurut Weygandt *et al.* (2019), “*outstanding shares* (saham beredar) berarti jumlah saham yang diterbitkan yang dipegang oleh pemegang saham”.

## **2.12 Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Kecurangan Laporan Keuangan**

Menurut Kurniawan *et al.* (2020), “kepemilikan manajerial adalah para pemegang saham yang sekaligus sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen dalam menyelaraskan kepentingannya. Kepemilikan saham oleh orang dalam dapat dianggap sebagai kebijakan untuk menyelesaikan masalah keagenan, karena kepemilikan manajerial akan menyelaraskan kepentingan manajemen dengan kepentingan pemegang saham secara keseluruhan. Kebijakan manajemen yang dinyatakan dalam jangka waktu kinerja keuangan perusahaan dapat dipengaruhi oleh jumlah saham yang dimiliki oleh orang dalam. Akibatnya, manajer akan membuat keputusan yang meningkatkan nilai perusahaan dan akan lebih transparan dalam menyajikan informasi keuangan”.

“Kepemilikan manajerial dianggap dapat mengurangi permasalahan keagenan. Kepemilikan manajerial berarti bahwa manajer memiliki peran sebagai pemegang saham atau pemilik. Oleh karena itu manajer (*agent*) akan bekerja sesuai dengan kepentingan pemegang saham (*principal*). Memiliki peran sebagai agen dan prinsipal dalam waktu yang bersamaan, akan terjadi penurunan tingkat konflik kepentingan. Hal tersebut akan mengurangi motivasi manajer untuk melakukan kecurangan laporan keuangan. Dengan kepemilikan manajerial, manajer akan lebih sungguh-sungguh dalam meningkatkan nilai perusahaan dan memotivasi manajer untuk bekerja sesuai dengan kepentingan *principal*” (Ferdianand dan Santosa, 2018).

Dwiputri dan Soepriyanto (2013) dalam Priswa dan Taqwa (2019) menyatakan bahwa “kepemilikan saham manajerial yang lebih tinggi dapat dilihat sebagai mekanisme untuk membatasi perilaku oportunistik dan adanya kecurangan diperkirakan akan berhubungan negatif dengan kepemilikan saham manajerial”. “Apabila kepemilikan saham oleh manajerial yang rendah, maka ada kecenderungan akan terjadinya perilaku *opportunistic* manajer yang akan meningkat juga” (Pratika dan Nurhayati, 2022).

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa kesimpulan mengenai pengaruh *corporate governance* yang diprosikan dengan kepemilikan manajerial terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ferdinand dan Santosa (2018) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian Priswa dan Taqwa (2019) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis alternatif untuk penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

**Ha<sub>5</sub>: *Corporate governance* berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.**

### **2.13 Pengaruh *Financial Stability, Leverage, Nature of Industry, Likuiditas, dan Corporate Governance* secara Simultan terhadap Kecurangan Laporan Keuangan**

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk menguji pengaruh *financial stability, leverage, nature of industry, likuiditas, dan corporate governance* terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Ferdinand dan Santosa (2018) yang menyatakan bahwa karakteristik audit komite, kepemilikan manajemen, *leverage*, dan likuiditas secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap terjadinya kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Irwandi *et al.* (2019) menyatakan bahwa *financial stability, nature of industry, dan auditor*

*opinion* secara simultan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Janrosl dan Yuliadi (2019) menunjukkan bahwa *financial leverage*, likuiditas, dan profitabilitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

## 2.14 Model Penelitian

Berikut adalah model penelitian pada penelitian ini.

